

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, maka setiap daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Peluang tersebut sebagai langkah awal dalam mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjanjikan dan memberi peluang yang besar bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimaksud adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, serta sumber daya alam, dalam memajukan kebudayaan, yang mengangkat citra bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Perkembangan pariwisata pada saat ini menimbulkan perdebatan yang dianggap kurang menguntungkan masyarakat setempat. Selain itu, ada beberapa faktor penghambat yang lain diantaranya kurang keterampilan, pengetahuan dan kebijakan terutama di negara-negara berkembang. Pengelolaan pariwisata yang

baik harus memberikan keuntungan ekonomi, sosial dan budaya kepada masyarakat di sekitar destinasi. Kemudian lahirlah pemikiran untuk mengembangkan pariwisata yang lebih berpihak kepada masyarakat, dikenal dengan istilah *community based tourism* (CBT) .<sup>1</sup>.

CBT merupakan salah satu bentuk pariwisata yang diupayakan aktifnya partisipasi masyarakat lokal pada perencanaan dan pembangunan dalam rangka mengembangkan wisata berkelanjutan. CBT menggunakan sumber daya alam dan budaya yang ada serta berkontribusi dalam pelestariannya sekaligus mengembangkan pemahaman antara penduduk dan wisatawan<sup>2</sup>. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata.<sup>3</sup> Pada prinsipnya CBT merupakan salah satu gagasan penting dan kritis dalam perkembangan konvensional yang seringkali mendapatkan kritik mengabaikan hak masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan

---

<sup>1</sup> Dolezal, Claudia and Marina, Novelli, 'Power in Community-Based Tourism : Empowerment and Partnership in Bali', *Journal Of Sustainable Tourism*, 2016, Hlm. 1-22, 2016.

<sup>2</sup> Miranda Cornelisse, 'Peru Case Study: Power Relations In Community-Based Tourism', *Journal Of Tourism And Cultural Change*, 2019, Hlm. 1-19.

<sup>3</sup> I Wayan Pantiyasa, 'Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar)', *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, Volume 1, Issue 2, 2018, Hlm. 13-46.

kegotongroyongan serta dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.<sup>4</sup>

Pengembangan ekonomi di pedesaan adalah bentuk implementasi gagasan dalam membangun desa. Pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka terbentuklah Peraturan Desa Tanjung Lanjut Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.<sup>5</sup> Pemerintah Desa Tanjung Lanjut mendirikan BUM Desa Tanjung Jaya Mandiri (TAJAM) melalui musyawarah desa pada tanggal 13 Juli 2015 dengan 6 unit jenis usaha yang dijalankan, yaitu: 1) Perkebunan kelapa sawit; 2) Simpan pinjam; 3) Bengkel las; 4) Perlengkapan alat pesta orkes musik; 5) Pasar desa dan 6) Wisata desa.<sup>6</sup>

Kehadiran BUM Desa dapat membantu menguatkan dan merealisasikan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. BUM Desa dilaksanakan oleh masyarakat dengan menjunjung prinsip kerja sama (kooperatif),

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentannng Desa.

<sup>5</sup> Ahmad Yani, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi', Skripsi Prodi Ilmu Pemerintahan, UIN Sultan Taha Jambi, 2019, Hlm. 1-60.

<sup>6</sup> Sutri Destemi Elsi , dan Faizah Bafadhal, 'Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Bumdes di Desa Tanjung Lanjut Sekernan Muaro Jambi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2019, Hlm. 33-37.

keikutsertaan (partisipatif), persamaan hak (emansipatif), keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban (akuntabel) dan keberlanjutan (sustainable). BUM Desa dapat mengorganisir kegiatan pembangunan secara tertata dikarenakan dasar pendiriannya telah diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan desa. BUM Desa memiliki struktur kepengurusan organisasi yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Adanya struktur kepengurusan dan kejelasan sumber dana pada BUM Desa mampu menjadikan masyarakat lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, terarah dan memiliki program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Objek wisata Danau Tangkas diresmikan pada tahun 2018. Pengelolaan wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut dikelola oleh BUM Desa TAJAM. Setelah resmi dibuka hingga sekarang, wisatanya mendapat respon yang baik oleh masyarakat sekitar maupun wisatawan dari luar. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah pada tahun 2019 yang berjumlah kurang lebih Rp.12 juta dan pada tahun 2020 pertanggal 20 bulan juli untuk PAD keseluruhan mencapai Rp.100 juta. Tetapi Pendapatan di tahun ini terkendala di Covid-19, hanya beroperasi selama 4 bulan.<sup>8</sup>

Namun dalam pengelolaan objek wisata Danau Tangkas belum baik, hal ini bisa dilihat dari keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan, belum adanya

---

<sup>7</sup> Kadek Sumiasih, "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7, No 4, 2018, Hlm. 565-585.

<sup>8</sup> Halo Jambi, "Indahnya Wisata Alam Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut, Ada Rumah Pohon Dan Jalur Track Hutan Lontin Di Atas Air", 2020. <<https://halojambi.id/index.php/mata-jambi/5782-indahnya-wisata-alam-danau-tangkas-di-desa-tanjung-lanjut-ada-rumah-pohon-dan-jalur-track-hutan-lontin-di-atas-air>>. Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2021.

lampu jalan yang memadai, kurangnya daya tarik atau aksesoris penunjang lainnya, dan juga terkendala oleh pasang surut air, serta belum adanya terobosan baru untuk menjadikan wisata ini lebih berkembang. Kemudian pemerintah desa sangat berharap adanya pembangunan bendungan sepanjang 100 meter dengan tinggi 2 meter dimaksudkan agar kondisi air danau dapat terus stabil.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang dalam mengelola objek wisata Danau Tangkas. Hal ini bisa dilihat dari sikap yang kurang ramah, dan ada beberapa pengelola masih di bawah umur sehingga belum mampu bekerja dengan baik dibidangnya. Tidak adanya cinderamata atau souvenir khas dari desa tersebut, serta tata letak toko atau warung yang kurang strategis.

Menurut berbagai sumber informasi, permasalahan mendasar dari penelitian ini dilakukan karena dalam pengelolaan masih cukup banyak kendala, terutama pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang kurang melek akan sadar wisata. Seharusnya warga lokal memperoleh dampak ekonomi dari kawasan wisata tersebut sebagai solusi meningkatkan hasil pendapatan serta belum adanya kerjasama antar aktor yang lainnya sehingga pemodalan untuk mengembangkan wisata sangat kecil.

Peran pemerintah dalam pengembangan CBT sangat penting. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat komunitas di sekitar destinasi. Pemerintah berperan dalam agar komunitas memiliki akses, kontrol, kesempatan dan kekuatan dalam pengembangan pariwisata melalui regulasi. Regulasi

---

<sup>9</sup> Aksi Post, 'Pengembangan Wisata Danau Tangkas Butuh Dukungan Masnah', 2020. <<https://www.aksipost.com/2020/07/13/pengembangan-wisata-danau-tangkas-butuh-dukkungan-masnah/>>. Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2021.

merupakan usaha pemerintah yang telah diberi kewenangan atau otoritas untuk mengatur aktivitas tertentu dalam wilayah yuridisnya yang berdampak pada meningkatnya akses, kontrol, kesempatan dan kekuatan komunitas. Pemerintah dapat memberlakukan aturan tertentu untuk mendukung atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan komunitas. Dalam kaitannya pemerintah menjamin stakeholder pariwisata tetap berperilaku dalam kebijakan pariwisata atau menuruti ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>10</sup>

Selain pemerintah, dalam mewujudkan pembangunan pariwisata perlu adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal. Pentingnya CBT dengan konsep tata kelola yang baik menjamin keberlanjutan keberadaan objek wisata. CBT sendiri dipandang sebagai strategi untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, konsep keberlanjutan berhubungan dengan lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, CBT dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata di daerahnya dan bagi wisatawan dapat menghargai kehidupan masyarakat lokal.<sup>11</sup>

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk tabel :

---

<sup>10</sup> Ayu Lestari, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lae Lae Makassar", Skripsi Prodi Ilmu Pemerintahan, 2020, Hlm. 1-76.

<sup>11</sup> Meseret Tamir, 'Challenges And Opportunities Of Community Based Tourism Development In Awi Zone A Case Study In Guagusa And Banja Woredas, Ethiopia', *Journal Of Tourism, Hospitality And Sports*, Volume 1, 2015, Hlm. 50-78.

**Tabel 1.1**  
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Ni Made Irnawati, Dale Sanders, Ross Dowling	<i>Host-guest orientations of community- based tourism products: a case study in Bali, Indonesia</i>	Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang produk pariwisata berbasis masyarakat melalui program penilaian persepsi masyarakat tuan rumah dan wisatawan. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menjelaskan fenomena CBT melalui program penilaian persepsi masyarakat tuan rumah dan wisatawan. Ada Sembilan elemen produk CBT yaitu atraksi, jasa perjalanan, transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, souvenir, pengemasan, fasilitas serta masyarakat. Masyarakat tuan rumah dan wisatawan sangat setuju tentang produk pariwisata CBT. Namun komunitas tuan rumah perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, khususnya dalam pengembangan SDM, dan mengupgrade fasilitas yang ada untuk

			berkontribusi dalam memberikan konsep CBT yang memuaskan. <sup>12</sup>
2	Deden Saputra	Tatakelola kolaborasi pengembangan kampung wisata berbasis masyarakat	Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang berperan dalam pengembangan secara langsung adalah dinas pariwisata kota Yogyakarta, lurah Patehan, akademisi, pengelola kampung wisata, dan pelaku/penyedia jasa wisata. Pola kerjasama pihak pemerintah dengan masyarakat berupa pembinaan, dan kerjasama pihak akademisi dengan masyarakat berupa pengkajian. Kepemimpinan fasilitatif dan kelembagaan yang eksklusif menjadi faktor penghambat proses kolaborasi pengembangan kampung wisata Tamansari. <sup>13</sup>
3	Faris Nurrahman	Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata berbasis	Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah POKDARWIS Sumbermadu berhasil menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Dan terdapat faktor-faktor pendorong keberhasilan

<sup>12</sup> Ni Ma Ernawati, Dale Sanders, And Ross Dowling, 'Host-Guest Orientations Of Community-Based Tourism Products: A Case Study In Bali, Indonesia', *International Journal Of Tourism Research*, 2016, Hlm. 1-16.

<sup>13</sup> Deden Saputra, 'Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm. 85-97.



		masyarakat ( <i>community-based tourism</i> ) melalui kelompok sadar wisata	penerapan konsep CBT di Desa Wisata Wiskuno adalah sebagai berikut: (1) Tokoh penggerak, (2) Dukungan Masyarakat, (3) Keunikan Lokasi, (4) Link. <sup>14</sup>
4	Aziizah Qurrotu Ainii	Kepemimpinan kepala desa dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ( <i>community based tourism</i> ) di desa Ponggok kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten	Penelitian ini mengambil desain penelitian kualitatif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan Kepala Desa Ponggok, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat dilihat melalui empat dimensi teori sifat yaitu dimensi kecerdasan, kedewasaan dan kebebasan hubungan sosial, motivasi diri dan motivasi berprestasi, serta hubungan antar manusia. Kepala Desa memiliki strategi berupa penataan ruang, sektoral, masyarakat pendekatan sumber daya dan teknologi informasi. Pengembangan wisata di Desa Ponggok selalu melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi dan memperhatikan aspek lingkungan serta kearifan budaya lokal. <sup>15</sup>

<sup>14</sup> Faris Nurrahman, 'Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism) melalui Kelompok Sadar Wisata', *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 7, Nomor 3, 2018, Hlm. 1-15.

<sup>15</sup> Aziizah Qurrotu Ainii, 'Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo

5	Rachmawati Novaria, Afifatur Rohimah	Pengembang an <i>community</i> <i>based</i> <i>tourism</i> sebagai strategi pemberdayaa n masyarakat dan pemasaran pariwisata di Wonosalam kabupaten Jombang	Penelitian ini berfokus mengidentifikasi potensi dan karakteristik wisata potensial, merumuskan model pemasaran destinasi wisata, dan menganalisis kesiapan masyarakat serta program-program yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Jombang dalam mengembangkan CBT melalui pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam pengelolaan dan promosi destinasi wisata. Model pengembangan CBT digunakan sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk mendukung program promosi dan memasarkan destinasi wisata. Dan produk wisatanya mempunyai potensi yang baik dan lengkap terdiri dari potensi religi, alam dan budaya. <sup>16</sup>
---	---	---	--

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki kemiripan yaitu sama-sama membahas CBT. Beberapa penelitian terdahulu tersebut belum mampu

---

Kabupaten Klaten', *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 8, Nomor 2, 2019, Hlm. 1-9.

<sup>16</sup> Rachmawati Novaria Dan Afifatur Rohimah, '*Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemasaran Pariwisata Di Wonosalam Kabupaten Jombang*', Makalah Seminar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017, Hlm. 91-101.

menjelaskan penerapan CBT yang lebih detail dalam pengelolaan wisata. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berfokus pada penerapan dan dampak CBT dalam pengelolaan wisata. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “*COMMUNITY BASED TOURISM* DALAM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DANAU TANGKAS”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep CBT dalam pengelolaan objek wisata Danau Tangkas?
2. Bagaimana dampak CBT dalam pengelolaan objek wisata Danau Tangkas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep CBT dalam pengelolaan daya tarik wisata Danau Tangkas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak CBT dalam pengelolaan daya tarik wisata Danau Tangkas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik serta menambah pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai penerapan konsep CBT dalam pengelolaan daya tarik wisata Danau Tangkas
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat dijadikan sebagai suatu bahan bacaan tentang konsep CBT.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Teori *Community Based Tourism***

Konsep CBT pertama kali muncul dalam karya Murphy pada tahun 1985 berhubungan dengan pariwisata serta pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. CBT sebagai suatu alternatif dari arus utama (*mainstream*) pengembangan pariwisata. Konsep ini memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen serta pengembangannya. Terdapat tiga unsur penting CBT yaitu, keterlibatan masyarakat lokal dalam manajemen dan pengembangan pariwisata, pemerataan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat dan pemberdayaan politik (*capacity building*) serta masyarakat lokal yang bertujuan sebagai pengambil keputusan.<sup>17</sup> Lebih khusus, CBT dianggap sebagai instrumen yang sangat tepat untuk kerjasama pembangunan dan

---

<sup>17</sup> Sri Endah Nurhidayati Dan Fandeli Chalid, '*Penerapan Prinsip Community Based Tourism ( CBT ) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu , Jawa Timur*', *Jejaring Administrasi Publik*, 2012, Hlm. 36-46.